

## **Determinan belanja modal provinsi di Indonesia: pendekatan analisis ekonomi dan sosial**

**Selamet Rahmadi**

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

*\*E-mail korespodensi: selametselamet023@gmail.com*

### **Abstract**

*This research aims to measure and analyze the influence of Regional Original Income, Tax Revenue Sharing Funds, GRDP, Human Development Index, Poverty Rate, and Open Unemployment Rate on Capital Expenditure in all Provinces in Indonesia. This study uses secondary data in the form of a Cross-Section period 2015-2023. The analytical tool used is semi-logarithmic panel data regression. Based on the measurement results, the influence value of various independent variables on the dependent variable is obtained. Regional Original Income, Tax Revenue Sharing Funds, GRDP, and the Human Development Index have a significant effect on capital expenditure. Meanwhile, the poverty rate and open unemployment rate do not have a significant effect on capital expenditure.*

**Keywords:** *capital expenditure, local original income, tax revenue sharing, gross regional domestic product, human development index, open unemployment rate, poverty rate.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengukur dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Belanja Modal Seluruh Provinsi Indonesia. Penelitian menggunakan data sekunder berbentuk Cross-Section selama periode tahun 2015-2023. Alat analisis yang digunakan regresi data panel semi logaritma. Berdasarkan hasil pengukuran didapat nilai pengaruh berbeda-beda variabel independen terhadap variabel dependen. Pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, PDRB dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

**Kata kunci:** *belanja modal, pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, PDRB, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola keuangan daerah. Instrument yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk

memperoleh asset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun, seperti infrastruktur, bangunan, dan peralatan. Namun, belanja modal pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut adalah keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber daya keuangan yang ada untuk membiayai belanja modal yang efektif dan efisien. Belanja modal yang dikelola efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Selama tahun 2015-2023 belanja modal pada 34 provinsi di Indonesia rata-rata mengalami peningkatan 15,57 %, tertinggi Provinsi Jambi 114,94 % dan terendah Provinsi Papua - 5,76 %.

Sumber keuangan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah. PAD dapat digunakan untuk membiayai belanja modal dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi PAD yang dimiliki pemerintah daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal. Hal searah dengan hasil penelitian Asmawiah dan Sulistiyo (2022), Arethusia dan Terawati (2025) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Rata-rata keseluruhan meningkat 8,73 %, tertinggi Provinsi Maluku Utara 23,16 % dan terendah Provinsi Jawa Timur 3,47 %. Bagi Hasil Pajak (BHP) juga merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal. Semakin besar BHP yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar belanja modal yang dapat dilakukan. (Hidayat dkk, 2024). Untuk rata-rata semua provinsi meningkat 331,88 %, tertinggi Provinsi Sulawesi Barat 1.254,89 % dan terendah Kalimantan Timur turun 10,38 %.

Sumber keuangan yang tersedia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Kinerja keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah setiap tahun. PDRB tinggi dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal. Hal ini disebabkan PDRB tinggi dapat membuka peluang menggali potensi serta meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi. PDRB menurut Azizah dkk (2023) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Rata-rata keseluruhan provinsi 7,91 %, tertinggi Provinsi Sulawesi Tengah 16,08 % dan terendah Kalimantan Timur 3,30 %.

Keberhasilan pembangunan daerah dapat juga ditentukan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang digunakan mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. IPM yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal. Kemampuan ini terlihat dari semakin meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pentingnya pembangunan daerah melalui meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Widiagma (2015) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, dimana semakin tinggi IPM suatu daerah akan meningkatkan belanja modal daerah tersebut. Rata-rata keseluruhan provinsi 70,86, tertinggi Provinsi DKI Jakarta 80,65 dan terendah Provinsi Papua 59,99.

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran juga merupakan indikator penting dalam menentukan kebijakan belanja modal pemerintah daerah. Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran mendorong kebijakan pemerintah daerah lebih meningkatkan alokasi anggarannya, terutama belanja modal kearah upaya pemenuhan

kebutuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Susilowati dkk. (2017), menyebutkan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, anggaran pemerintah lebih besar dialokasikan pada belanja yang berorientasi pelayanan sosial bagi masyarakat. Rata-rata secara nasional tingkat kemiskinan 10,65 %, tertinggi Provinsi Papua 25,47 % dan terendah DKI Jakarta 4,10 %. Tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat. Rendahnya daya beli mendorong pemerintah terus berupaya meningkatkan anggaran belanjanya sebagai bentuk investasi kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja sebesar mungkin. (Fikri dan Anis, 2023). Kondisi tingkat pengangguran provinsi di Indonesia terus mengalami penurunan. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka seluruh provinsi 5,62 %, tertinggi Provinsi Banten 8,84 % dan terendah Provinsi Bali 2,98 %.

Dengan mempertimbangkan variasi variabel-variabel diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Belanja Modal Seluruh Provinsi Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori belanja daerah dan belanja modal**

Belanja daerah merupakan bentuk pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah. Belanja daerah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian belanja daerah terkait dengan besarnya penganggaran di sektor publik oleh pemerintah melalui proses penentuan alokasi dana dalam menjalankan fungsi pemerintahan terutama dalam sektor infrastruktur untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Belanja daerah terus meningkat seiring meningkatnya aktivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah. Peningkatan ini sesuai dengan teori fiskal publik yang dijelaskan Musgrave bahwa peningkatan terjadi sebagai akibat fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Wagner menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah terjadi seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa publik. (Yunus dan Anwar, 2021). Belanja modal merupakan komponen dari belanja daerah, dimana belanja modal adalah pengeluaran pemerintah untuk memperoleh asset tetap yang memiliki nilai tinggi dan dalam jangka waktu lama. Tujuan dari belanja modal adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. (Rahmadi dkk, 2022). Susanti dan Fahlevi (2016) menjelaskan belanja modal yang dilakukan dikelompokkan atas : belanja publik, dan belanja aparatur. Halim (2016) belanja modal digunakan untuk menambah asset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta asset tetap lainnya.

### **Teori penerimaan pemerintah**

Penerimaan pemerintah menurut Ridwan dan Nawir (2021) merupakan sumber daya yang diperoleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai sumber termasuk pajak, retribusi, dan lain-lain

(Suparmoko, 2012). Penerimaan yang diterima pemerintah ditujukan untuk : membiayai kegiatan pemerintah sehari-hari, mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. (Enas dkk, 2021).

Teori pendapatan negara mencoba menjelaskan tentang sumber-sumber penerimaan negara termasuk pajak, pendapatan non pajak dan hibah. Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola pendapatan negara untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam pembangunan. Teori Wagner memperkuat pendapat tersebut bahwa penerimaan negara harus disesuaikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Suparmoko, 2012)

### **Konsep keuangan daerah**

Keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan negara karena mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Mardiasmo (2018) mendefinisikan keuangan daerah sebagai seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, keuangan daerah terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan. Kedua, belanja daerah yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja transfer yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Ketiga, pembiayaan daerah yang meliputi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pinjaman daerah, dan dana cadangan, yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran maupun membiayai kebutuhan tertentu pada periode anggaran berikutnya.

Halim (2016) menguraikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Undang-Undang No.1 tahun 2022 menjelaskan sumber penerimaan PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **Produk domestik regional bruto (PDRB)**

Keberhasilan pembangunan di daerah terlihat dari adanya peningkatan pada PDRB secara terus menerus setiap tahun. Peningkatan PDRB yang tinggi, mendorong terjadi perubahan di seluruh aspek, seperti ketersediaan infrastruktur, pelayanan publik semakin baik, dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi melalui pemenuhan kebutuhan mendasar oleh masyarakat.

PDRB sebagai cerminan kemajuan daerah dari waktu ke waktu, pengukurannya dilakukan dengan mengacu pada peningkatan yang terjadi atas barang dan jasa yang dihasilkan juga berperan sebagai salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan

pembangunan suatu negara. (Iksan dkk, 2024). Selain itu daerah dapat menggunakannya cara untuk mengukur kinerja ekonomi, sebagai acuan perencanaan pembangunan, menganalisis ekonomi dan mengukur pertumbuhan ekonomi.

Pengukuran PDRB secara konsep hampir mirip dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional. Menghitung PDRB dapat dilakukan melalui tiga metode yaitu metode produksi, metode pengeluaran dan metode pendapatan. Selanjutnya dalam perhitungannya dapat menggunakan atas dasar harga konstan (ADHK) dan atas harga berlaku (ADHB). PDRB ADHK berguna untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil, menganalisis struktur ekonomi, dan membuat kebijakan ekonomi. PDRB ADHB digunakan untuk mengukur nilai nominal, menganalisis pendapatan daerah, dan membuat kebijakan fiskal. (Daryanto, 2018). Pengukuran pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan daerah adalah PDRB ADHK. Hal disebabkan angka pertumbuhannya menggambarkan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya peningkatan produksi dan mengetahui terjadinya keseimbangan dalam perekonomian dalam rangka memperbaiki perekonomian suatu daerah. (Arsyad, 2020).

Pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dari pembangunan suatu negara atau daerah dapat terjadi banyak faktor yang menentukannya. Jhingan, M.L (2018) mencoba menjelaskan beberapa teori bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat terjadi. Teori Klasik menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dapat terjadi didorong oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas. Teori Harrod-Domar menjelaskan pertumbuhan ekonomi terjadi ditentukan oleh tingkat investasi dan tingkat pertumbuhan penduduk. Teori pertumbuhan ekonomi Solow menjelaskan pertumbuhan ekonomi terjadi ditentukan oleh modal, tenaga kerja dan kemajuan teknologi.

### **Indeks pembangunan manusia (IPM)**

Pembangunan daerah dikatakan berhasil jika memiliki kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang baik. SDM yang berkualitas akan mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan melalui penguasaan serta menggunakan skill dan iptek untuk berperan aktif mengisi kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan membangun SDM di daerah yang berkualitas dapat diketahui melalui nilai IPM. Secara umum IPM merupakan suatu indeks yang dipakai mengukur keberhasilan pembangunan manusia suatu negara/wilayah dengan menggunakan indikator tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa IPM merupakan indikator komposit dalam mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia dengan menggunakan angka harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak sebagai faktor penentunya.

Sementara Safuidar dan Ika (2019) dalam Rahmadi dan Nurjanah (2022) menyatakan, indikator mengukur IPM adalah indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak. Adapun skala ukuran IPM dikelompokkan atas sangat tinggi dengan nilai  $> 80$ , tinggi dengan nilai  $70 - 80$ , sedang dengan nilai  $60-70$  dan rendah dengan nilai  $< 60$ . (Rahmadi dan Nurjanah, 2022).

### **Tingkat pengangguran**

Lestari dan Woyanti (2020) pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran yang terjadi disebabkan banyak faktor. Probosiwi (2016),

pengangguran terjadi karena ketidak seimbang antara penambahan jumlah angkatan kerja dengan penambahan jumlah lapangan kerja yang ada. Subandi (2018) mencoba menjelaskan beberapa teori tentang pengangguran : Teori Klasik menguraikan penyebab terjadinya pengangguran karena adanya ketidak seimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Teori Keynesian menjelaskan penyebab pengangguran karena adanya kekurangan permintaan agregat dalam perekonomian. Sementara Teori Struktural berpendapat pengangguran terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi yang mengakibatkan ketidak cocokan antara ketrampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Prawoto (2019) menjelaskan dilihat dari penyebab, pengangguran terdiri dari : normal/friksional, struktural, konjungtur dan teknologi. Berdasarkan cirinya, pengangguran dikelompokkan atas: terbuka, tersembunyi, musiman dan setengah menganggur.

### **Tingkat kemiskinan**

Pembangunan suatu negara/daerah bertujuan meningkatkan derajat dan kualitas hidup masyarakatnya. Indikator keberhasilan proses pembangunan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan tersebut terlihat sejauh mana tingkat kemiskinan yang ada terus mengalami penurunan. Kemiskinan menurut Chambers dalam Arsyad (2020) suatu kondisi yang mencakup kurangnya pendapatan, kekurangan material, dan kekurangan kemampuan serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Selain itu kemiskinan adalah kondisi dimana individu atau kelompok tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. (Kuncoro (2019).

Seseorang dikatakan miskin menurut World Bank dalam Vita (2018) diukur menggunakan *poverty headcount ratio* (P0), *poverty gap index* (P1), dan *sguared poverty gap index* (P2). Sementara Sen mengukur kemiskinan berdasarkan indeks kemiskinan manusia dan indeks kemiskinan multidimensi. Indonesia saat ini menetapkan seseorang dikatakan miskin berdasarkan garis kemiskinan seseorang sebesar Rp. 595.242 perkapita perbulan terdiri dari garis kemiskinan makanan Rp. 443.433 perkapita perbulan dan garis kemiskinan bukan makanan Rp. 151.809 perkapita perbulan. Sementara garis kemiskinan Bank Dunia adalah \$ 3,00 atau Rp. 18.213 perhari per orang. (BPS, 2024).

Kemiskinan terjadi disebabkan banyak faktor. Irawan dan Suparmoko dalam Rahmadi dan Nurjanah (2022) faktor tersebut dijelaskan dalam teori : 1). Teori kemiskinan kultural, kemiskinan terjadi disebabkan oleh budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu. 2). Teori kemiskinan struktural disebabkan ketidak mampuan individu/kelompok meningkatkan taraf hidup karena ketidakadilan dan tidak meratanya struktur sosial dan ekonomi. 3). Teori kemiskinan siklus disebabkan kurangnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan. 4). Teori kemiskinan NeoKlasik disebabkan kurangnya kemampuan individu dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

### **METODE**

Penelitian menggunakan data sekunder dari 34 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2015-2023 dan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yaitu : Buku Statistik Indonesia dan Buku Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi. Analisis data menggunakan regresi data panel semi logaritma (data *time series* dan *cross section*) serta membagi variabel menjadi dua yaitu faktor ekonomi : Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Bagi Hasil Pajak (BHP), PDRB dan Belanja Modal) dan faktor sosial : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan (TKM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Widarjono (2018) regresi data panel menggunakan tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model(FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* dan pemilihan model terbaik memakai Uji Chow, Uji Hausman dan *Uji Lagrange Multiplier (LM)*, uji hipotesis (Uji t dan Uji F), dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan program EVIEWS 10. Uji asumsi klasik tidak dilakukan, karena penelitian menggunakan data panel memiliki kelebihan seperti lebih informatif, variabilitas yang lebih besar dan kolinearitas yang rendah antar variabel. (Gujarati dan Porter, 2012). Persamaan yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{LogBM}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPAD}_t + \beta_2 \text{LogBHP}_t + \beta_3 \text{LogPDRB}_t + \beta_4 \text{IPM}_t + \beta_5 \text{TKM}_t + \beta_6 \text{TPT}_t + e_t \dots(1)$$

Keterangan :

- BM = Belanja modal
- PAD = Pendapatan asli daerah
- BHP = Bagi hasil pajak
- PDRB = Produk domestik regional bruto
- IPM = Indeks pembangunan manusia
- TKM = Tingkat kemiskinan
- TPT = Tingkat pengangguran terbuka
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$  = Koefisien regresi
- $e_t$  = *Error term*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemilihan model terbaik

Regresi data panel dirasa cocok untuk menangkap adanya keragaman atau perbedaan antar provinsi dan antar waktu secara bersama-sama dalam menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Belanja Modal di seluruh provinsi Indonesia selama periode 2015-2023. Hasil regresi tiga pendekatan regresi data panel yang dilakukan dan dilanjutkan pengujian pemilihan model maka model terbaik digunakan *Random Effect Model*.

**Tabel 1.** Ringkasan hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.924367	(31,250)	0.0000
Cross-section Chi-square	231.056705	31	0.0000

Sumber: data diolah, 2025

Hasil uji Chow menunjukkan *Cross-section Chi-square* memiliki nilai *Statistic* = 231.056705 dan *Prob.* = 0.0000 < 0,05 berarti model *Fixed Effects* model terbaik dan terpilih dibanding model *Common Effects*.

**Tabel 2.** Ringkasan hasil uji hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.227957	6	0.1612

Sumber: data diolah, 2025

Hasil uji menunjukkan *Cross-section random* nilai *Chi-Sq Statistic* = 9.227957 dan Prob. = 0.1612 > 0,05 berarti model *Random Effects* model lebih baik dan terlipih dibanding model *Fixed Effects*.

**Tabel 3.** Ringkasan Hasil Uji Lagrange Multiplier

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	2.182578 (0.1496)	0.951323 (0.3294)	3.133901 (0.0767)
Honda	1.477355 (0.0798)	-0.975358 (0.8353)	0.354965 (0.3613)
King-Wu	1.477355 (0.0918)	-0.975358 (0.8353)	-0.287248 (0.6130)
GHM	--	--	255.6659 (0.0000)

Sumber: data diolah, 2025

Hasil uji menunjukkan nilai *Cross-section One-sided* Breusch-Pagan 0.1496, Honda 0.0798, King-Wu 0,0918 > 0,05 berarti model *Random Effects* model lebih baik dan terlipih dibanding model *Common Effects*. Hasil uji pemilihan model ada dua uji yang memberikan kesimpulan sama uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier, maka analisis data panel memakai model *Random Effects*

**Estimasi persamaan regresi data panel**

Estimasi persamaan hasil regresi data panel yang terbaik dan dipilih adalah *Random Effects Model* dengan output regresinya sebagai berikut :

**Tabel 4.** Ringkasan hasil regresi *random effects model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.438001	0.641445	5.359775	0.0007
LOGPAD?	0.459315	0.115368	3.981303	0.0142
LOGBHP?	0.040914	0.013015	3.143604	0.0396
LOGPDRB?	0.117931	0.032209	3.661430	0.0415
IPM?	0.397952	0.120734	3.296106	0.0292
TKM?	0.026696	0.025159	1.061091	0.0517
TPT?	0.023183	0.009141	2.536156	0.1231

Sumber: data diolah, 2025

$$\text{LogBM}_t = 3,438001 + 0,459315\text{LogPAD}_t + 0,040914\text{LogBHP}_t + 0,117931\text{LogPDRB}_t + 0,397952\text{IPM}_t + 0,026696\text{TKM}_t + 0,023183\text{TPT}_t + e_t \dots\dots\dots(2)$$

Berdasarkan nilai koefisien estimasi pada persamaan regresi, interpretasi pengaruh variabel independen terhadap belanja modal dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan perbedaan antarprovinsi dan dimensi waktu. Nilai konstanta sebesar 3,438001 menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran berada pada kondisi konstan, maka rata-rata belanja modal seluruh provinsi di Indonesia adalah sebesar 3,438001 persen.

Pendapatan asli daerah memiliki koefisien sebesar 0,459315, yang berarti bahwa peningkatan PAD sebesar 1 persen akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,459315 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Pengaruh ini bersifat signifikan secara statistik, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0142. Selanjutnya, variabel bagi hasil pajak memiliki koefisien sebesar 0,040914, yang mengindikasikan bahwa kenaikan BHP sebesar 1 persen akan mendorong peningkatan belanja modal sebesar 0,040914 persen, dengan tingkat signifikansi yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas 0,0396.

Produk domestik regional bruto menunjukkan koefisien positif sebesar 0,117931, yang berarti bahwa peningkatan PDRB sebesar 1 persen akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,117931 persen. Pengaruh PDRB terhadap belanja modal ini signifikan secara statistik pada tingkat probabilitas 0,0415. Sementara itu, indeks pembangunan manusia memiliki koefisien sebesar 0,397952, yang mengindikasikan bahwa peningkatan IPM sebesar 1 persen mampu meningkatkan belanja modal sebesar 0,397952 persen, dengan nilai probabilitas 0,0292.

Adapun variabel tingkat kemiskinan memiliki koefisien positif sebesar 0,026696, yang menunjukkan bahwa kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen cenderung diikuti oleh peningkatan belanja modal sebesar 0,026696 persen. Namun demikian, pengaruh ini berada pada batas signifikansi statistik dengan nilai probabilitas sebesar 0,0517. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien sebesar 0,023183, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran sebesar 1 persen berpotensi meningkatkan belanja modal sebesar 0,023183 persen, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai probabilitasnya sebesar 0,1231.

Hasil perhitungan juga menjelaskan efek spesifik atau variasi perbedaan untuk setiap provinsi. Berdasarkan Tabel 5, setiap provinsi memiliki efek spesifikasi berbeda-beda (positif dan negatif). Efek positif artinya nilai aktual lebih tinggi dari yang diharapkan dan berlaku untuk sebaliknya. Perbedaan terjadi karena faktor kebijakan pemerintah, prioritas pembangunan, kondisi sosial dan ekonomi, dan faktor lain yang spesifik di setiap provinsi berbeda.

Efek bernilai positif ada lima belas provinsi, terbesar provinsi Maluku Utara 0,313146. Artinya belanja modal provinsi Maluku Utara lebih tinggi 0,313146 dari nilai aktual berdasarkan variabel independen dalam model (nilai individual effect 3,751147). Sementara efek bernilai negatif ada sembilan belas provinsi, nilai efek negatif terbesar provinsi Sulawesi Tenggara -0,230868. Artinya belanja modal provinsi Sulawesi Tenggara lebih rendah 0,230868 dari nilai aktual berdasarkan variabel independen dalam model (nilai individual effect 3,207133).

**Tabel 5.** Nilai individual effect Provinsi di Indonesia

Provinsi	Effect Spesifikasi	Nilai Actual (C)	Individual Effect
Aceh	0.198053		3.636054
Sumatera Utara	-0.072961		3.365040
Sumatera Barat	0.016488		3.454489
Riau	0.057274		3.495275
Jambi	-0.105648		3.332353
Sumatera Selatan	-0.044082		3.393919
Bengkulu	-0.140753		3.297248
Lampung	-0.095018		3.342983
Bangka Belitung	-0.102694		3.335307
Kepulauan Riau	-0.137398		3.300603
DKI Jakarta	0.286853		3.724854
Jawa Barat	-0.134697		3.303304
Jawa Tengah	-0.190041		3.247960
Jawa Timur	-0.141117		3.296884
DI Yogyakarta	-0.085419		3.352582
Banten	-0.100111		3.337890
Bali	-0.111946		3.326055
NTB	-0.082001	3.438001	3.356000
NTT	-0.040701		3.397300
Kalimantan Barat	0.128517		3.566518
Kalimantan Tengah	0.033385		3.471386
Kalimantan Selatan	0.038853		3.476854
Kalimantan Timur	0.161946		3.599947
Kalimantan Utara	0.009929		3.447930
Sulawesi Utara	-0.107262		3.330739
Sulawesi Tengah	-0.035985		3.402016
Sulawesi Selatan	0.162211		3.600212
Sulawesi Tenggara	-0.230868		3.207133
Gorontalo	0.068713		3.506714
Sulawesi Barat	-0.011812		3.426189
Maluku	0.250017		3.688018
Maluku Utara	0.313146		3.751147
Papuan Barat	0.100035		3.538036
Papua	0.160274		3.598275

Sumber: data diolah, 2025

**Uji hipotesis dan koefisien determinasi ( R<sup>2</sup> )**

Uji hipotesis dilakukan dalam persamaan regresi berganda dalam upaya untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel, menghindari kesimpulan yang salah, dan menentukan arah hubungan tentang hubungan antar variabel independen dan variabel

dependen. Gujarati dan Porter (2012) menerangkan uji hipotesis dapat dilakukan menggunakan uji t statistik (uji parsial) dan uji F statistik (uji bersama-sama).

**Tabel 6.** Ringkasan hasil regresi uji F dan uji t

<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
C	3.438001	0.641445	5.359775	0.0007
LOGPAD?	0.459315	0.115368	3.981303	0.0142
LOGBHP?	0.040914	0.013015	3.143604	0.0396
LOGPDRB?	0.117931	0.032209	3.661430	0.0415
IPM?	0.397952	0.120734	3.296106	0.0292
TKM?	0.026696	0.025159	1.061091	0.0517
TPT?	0.023183	0.009141	2.536156	0.1231
F-statistic	21.71629			
Prob(F-statistic)	0.000918			
Adjusted R-squared	0.768351			

Sumber: data diolah, 2025

Uji F atau uji *overall* digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi regresi, diperoleh nilai F-statistic sebesar 21,71629 dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000918. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak (BHP), produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan (TKM), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal (BM) seluruh provinsi di Indonesia.

Selanjutnya, uji t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (Prob.) setiap variabel independen dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai Prob. sebesar 0,0142, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal seluruh provinsi di Indonesia.

Variabel bagi hasil pajak (BHP) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, dengan nilai Prob. sebesar 0,0396 yang lebih kecil dari 0,05. Demikian pula, produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki nilai Prob. sebesar 0,0415, yang mengindikasikan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan nilai Prob. sebesar 0,0292, sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal di seluruh provinsi Indonesia.

Berbeda dengan variabel sebelumnya, tingkat kemiskinan (TKM) memiliki nilai Prob. sebesar 0,0517 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa TKM tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki nilai Prob. yang lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa TPT juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di seluruh provinsi Indonesia. Dengan demikian, meskipun secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan, secara parsial hanya PAD, BHP, PDRB, dan IPM yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang sering digunakan untuk mengetahui seberapa baik model regresi berganda yang digunakan serta menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R-squared) hasil perhitungan menunjukkan nilai sebesar 0,768351. Artinya 76,84 % variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dipakai dalam model regresi. Menurut Gujarati dan Porter (2012) model yang digunakan masuk dalam katagori baik(tinggi) dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen, meskipun masih ada 23,16 % variasi yang tidak dapat dijelaskan dalam model.

### **Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal**

PAD sebagai faktor ekonomi memberikan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada seluruh provinsi di Indonesia. Hasil temuan searah dengan hasil penelitian Rayhandita dan Rohman (2024), Asmawiah dan Sulistiyo (2022) dan Verawaty dan Salwa (2023) yang menyatakan PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja modal.

Pengaruh PAD pada belanja modal tidak terlepas dari konteks otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus pengelolaan keuangannya secara mandiri termasuk PAD. Pengaruh PAD pada belanja modal memberikan menggambarkan : keberhasilan pemerintahan provinsi mengelola potensi daerah menjadi sumber penerimaan daerah, kemampuan pemerintah daerah menjaga ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan, dan kemandirian keuangannya atas ketergantungan dari pemerintah pusat.

Kondisi ini juga merefleksikan upaya sungguh-sungguh pemerintah provinsi menggunakan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan, khususnya melalui belanja modal. PAD meningkat akan mengakibatkan alokasi belanja modal yang lebih besar, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya investasi pada infrastruktur. (Suparmoko, 2012). Peningkatan belanja modal dalam pembangunan diharapkan mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi setiap provinsi.

Peningkatan PAD mencerminkan kemandirian keuangan daerah pemerintah provinsi tdk terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat serta memungkinkan mereka untuk mengalokasikan dana secara lebih strategis ke belanja modal, sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

### **Pengaruh bagi hasil pajak terhadap belanja modal**

Bagi hasil pajak merupakan bentuk pembagian pendapatan pajak antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk transfer. Sistem ini menjelaskan bagaimana pemerintah pusat memungut pajak di daerah yang selanjutnya membagikan sebagian dari pendapatan pajak tersebut kepada pemerintah daerah. Bagi hasil pajak bertujuan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan diberikan kebebasan untuk mengelolannya. Pembagian bagi hasil pajak biasanya ditentukan berdasarkan proporsi tertentu dan berbeda-beda besarnya tergantung pada jenis pajak dan kebijakan pemerintah.

Bagi hasil pajak sebagai bentuk pembagian pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk menutupi kekurangan anggaran belanja yang ada di daerah untuk membiayai pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2018).

Pentingnya bagi hasil pajak bagi pembangunan daerah mendorong setiap daerah terus berupaya meningkatkannya dan meningkatkan kontribusinya pada pendapatan dan belanja daerah. Kontribusi besar dana tersebut akan mendorong alokasi belanja daerah semakin besar pada setiap komponen belanja daerah terutama pada belanja modal.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil penelitian dimana penerimaan BHP provinsi di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya semakin besar BHP yang mampu digali maka akan dapat meningkatkan belanja modal. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Purnasari dkk (2022) dan Cindriyanti dkk (2024).

### **Pengaruh produk domestik regional bruto terhadap belanja modal**

PDRB memiliki peran penting sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah. PDRB yang meningkat menyebabkan produksi, investasi dan konsumsi juga meningkat. Kondisi ini membawa dampak semakin besarnya potensi di daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan oleh pemerintah. Sumber penerimaan yang terus meningkat menggambarkan semakin baiknya kemampuan atau ketersediaan finansial pemerintah daerah yang dapat dialokasikan sebagai belanja disetiap aspek kegiatan dalam perekonomian daerah.

Alokasi dana belanja yang besar memungkinkan pemerintah daerah menginvestasikan anggarannya terutama belanja modal untuk keperluan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan dan bangunan publik lainnya. Ketersediaan dan semakin berkualitaskannya infrastruktur bagi publik akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah.

Keterkaitan kuat PDRB pada belanja modal terlihat dari hasil penelitian, dimana di seluruh provinsi di Indonesia PDRB secara signifikan dapat meningkatkan belanja modal. Temuan hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Setyowati (2023), Haq dan Syamsuddin (2024), Andaresta (2021).

### **Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap belanja modal**

Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan belanja modal memberikan pengaruh positif. Pengaruh IPM dapat mendorong meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan semua itu membutuhkan dan menyebabkan anggaran meningkat terutama belanja modal.

Pentingnya IPM terhadap belanja modal tersebut diatas sesuai dengan hasil temuan, dimana untuk seluruh Provinsi di Indonesia IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya semakin meningkat IPM suatu provinsi maka akan menyebabkan belanja modal turut meningkat. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Andaiyani (2012) dan Sen dan Haq dalam teori pembangunan manusia dan investasi dalam modal manusia. (Subandi, 2024).

### **Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap belanja modal**

Kemiskinan adalah masalah utama didalam pembangunan, keberhasilan daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sering diikuti dengan adanya peningkatan kemiskinan. Hal ini lebih disebabkan pembangunan kurang memperhatikan terciptanya pemerataan pembangunan yang menyangkut banyak aspek dimasyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus bisa meningkatkan perannya secara lebih optimal melalui fungsi stabilisator, dinamisator, dan distributor.

Peningkatan peran tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi. Pengurangan kemiskinan dapat dilakukan bila tiga fungsi diatas mampu dilaksanakan secara baik dan benar. Upaya tersebut membuat pemerintah perlu mempersiapkan anggaran yang besar. Teori pertumbuhan ekonomi, teori pembangunan manusia (Sen dan Ul Haq), teori keuangan publik (Musgrave) dan, teori investasi infrastruktur (Lethesen) mencoba menjelaskan bagaimana kebijakan anggaran terutama belanja modal hendaknya diarahkan dalam mengatasi kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan sarana publik terkait dengan pemenuhan atas layanan dasar, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Subandi, 2024).

Uraian diatas secara jelas menunjukkan bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap belanja modal. Hasil penelitian memberikan hasil yang sama, dimana tingkat kemiskinan meningkat dapat mendorong peningkatan belanja modal walaupun tidak signifikan seluruh provinsi di Indonesia. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Isramiwarti dkk. (2017), dimana variabel Belanja Daerah (BD) sebagai variabel mediasi (intervening) cukup berperan penting dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Verawati dan Salwa (2023), dimana kemiskinan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh tingkat pengangguran terhadap belanja modal**

Pengangguran dan belanja daerah memiliki hubungan yang kompleks. Pengangguran yang tinggi dapat menurunkan pendapatan daerah melalui berbagai cara, seperti penurunan pendapatan pajak dan belanja konsumen. Namun, pemerintah daerah juga dapat mengambil tindakan untuk mengurangi pengangguran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan belanja daerah, khususnya belanja modal melalui berbagai program pembangunan.

Tingkat pengangguran terbuka hasil penelitian memberi hasil mampu mempengaruhi belanja modal seluruh provinsi di Indonesia pengaruh tetapi tidak signifikan. Artinya peningkatan belanja modal semakin meningkat seiring meningkatnya tingkat pengangguran. Hal disebabkan peningkatan digunakan untuk memperbesar pembangunan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan permintaan agregat dan mengurangi pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja. (Keynes dalam Subandi 2024). Hasil temuan dalam penelitian sesuai dengan penelitian Mariyana (2017), Dumaris dkk (2024), dan Verawaty dan Salwa (2023) dimana pengangguran terbuka berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil perhitungan data panel dari variabel PAD, BHP, PDRB, IPM, TKM, dan TPT memberikan koefisien regresi dan hasil pengaruh yang berbeda-beda terhadap belanja modal secara keseluruhan provinsi di Indonesia. Pada tingkat signifikansi yang digunakan 0,05 sebagai penentu signifikansi atau tidaknya, maka terdapat empat variabel memberikan pengaruh positif dan signifikan mampu meningkatkan belanja modal secara keseluruhan provinsi di Indonesia. Dimana masing-masing probabilitasnya adalah pendapatan asli daerah 0,0142, bagi hasil pajak 0,0396, PDRB 0,0415, dan indeks pembangunan manusia 0,0292 dan lebih kecil dari 0,05. Sementara dua variabel berpengaruh positif dan mampu meningkatkan belanja modal tetapi tidak signifikan dengan nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 yaitu tingkat kemiskinan 0,0517 dan tingkat pengangguran terbuka 0,1231.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah seluruh provinsi di Indonesia mengoptimalkan peningkatan belanja modal melalui penguatan faktor-faktor penentunya. Upaya tersebut meliputi peningkatan penerimaan PAD dan BHP melalui perluasan basis dan tarif penerimaan, pengembangan sumber pendapatan baru, serta pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel dengan alokasi pada belanja modal yang produktif. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan PDRB secara berkelanjutan melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor ekonomi, kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi kreatif dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Di sisi sosial, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran perlu menjadi prioritas melalui peningkatan akses pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, perluasan akses pembiayaan, serta penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, peningkatan IPM harus terus diupayakan melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan standar hidup layak, penguatan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaresta, S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015–2019). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi (KIAFE)*, 10(4).
- Andaiyani. (2012). Pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan belanja operasional terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 1(1).
- Arethusa, A., Tasya, T., & Terawati, M. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1).
- Arsyad, L. (2020). *Ekonomi pembangunan* (Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.
- Asmawiah, S., Hajar, H., & Sulistiyo, H. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. BPS Republik Indonesia.
- Cindriyanti, Hambani, S., & Anwar, S. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal Provinsi Jawa Barat. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 9(3).
- Daryanto. (2018). *Model-model kuantitatif untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah: Konsep dan aplikasi*. IPB Press.
- Dumaris, A., Br. Purbra, A., Tarmizi, T., & Murtala. (2024). Pengaruh PDRB, belanja daerah, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(2).
- Enas, U., Moeljono, Z., Pribadi, Y., Syairozi, I. M., Uliansyah, A. B., Sunyoto, E., Sijabat, R., Sarasi, V., Hartoto, H., Sugiri, D., & Rahayu, H. A. (2021). *Keuangan negara*. Widina Bhakti Persada.
- Fikri, I., & Anis, A. (2023). Pengaruh pembayaran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap pengangguran di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*, 5(1).
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (Edisi ke-5, Jilid 2). Salemba Empat.

- Halim, A. (2016). *Analisis laporan keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Haq, M. I., & Syamsuddin. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2021 dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 22(1).
- Hidayat, T., Permatasari, D., Maulina, M., & Aeni, P. (2024). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan kinerja keuangan terhadap belanja modal. *AKUBIS: Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(1).
- Iksan, A., Sartiyah, S., Setyawati, I., Wattimena, L., Sinurat, J., Puspita, Y., Yudawisastra, H. G., Wicaksono, R. A., Juliansyah, R., & Luthfinur, N. L. (2024). *Ekonomi pembangunan*. Widina Media Utama.
- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan dengan belanja daerah sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2011–2015. *Pekbis Jurnal*, 9(3).
- Jhingan, M. L. (2018). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (Cetakan ke-18). RajaGrafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2019). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Rajawali Press.
- Lestari, N. D., & Woyanti, N. (2020). Pengaruh PDRB, UMK, jumlah penduduk, dan inflasi terhadap pengangguran di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2011–2017. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 5(1).
- Lutfiah, N., Pasaribu, J. R. S., Hutagalung, I., & Purba, A. A. (2023). Analisis pengaruh PDRB dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2018–2022. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(1).
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mariyana. (2017). Pengaruh belanja daerah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 6(1).
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar ekonomi makro*. RajaGrafindo Persada.
- Probosiwi, R. (2016). Pengangguran dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 15(2).
- Purnasari, N., Sitompul, E., & Laowo, D. K. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal daerah Sumatera Utara tahun 2017–2019. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Rahmadi, S., Hastuti, D., & Parmadi. (2022). Pengaruh belanja modal urusan wajib dan urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin dengan jumlah pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1).
- Rahmadi, S., & Nurjanah, R. (2022). Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3).
- Rayhandita, A., Anthony, A., & Rohman, A. (2024). Pengaruh peningkatan PAD dan dana transfer terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(2).
- Ridwan, & Nawir, S. I. (2021). *Ekonomi publik*. Pustaka Pelajar.
- Setyowati, L. (2023). Pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan pendapatan daerah dan dana alokasi terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing (JAKA)*, 4(1).
- Subandi. (2018). *Ekonomi pembangunan*. Alfabeta.

- Suparmoko, M. (2012). *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. BPFÉ.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1).
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, dan PDRB terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Verawaty, & Salwa, S. (2023). Pengaruh PAD, dana perimbangan, SiLPA, kemiskinan, dan pengangguran terhadap IPM dengan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1).
- Vita, D. F. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1).
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya* (Edisi ke-4). UPP STIM YKPN.
- Widiagma, A. P. (2015). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, Universitas Jember.
- Yunus, R., & Anwar, A. I. (2021). *Ekonomi publik*. PT Nasya Expanding Management (NEM).